

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian bahu-membahu mengelola dan menggerakkan potensi ekonomi agar mencapai hasil yang optimal. Lembaga keuangan, khususnya lembaga Perbankan mempunyai peranan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara (Sinungan, 2000).

Di negara - negara seperti Indonesia peranan bank cenderung lebih penting dalam pembangunan, karena bukan hanya sebagai sumber pembiayaan tetapi juga mampu mempengaruhi siklus usaha dalam perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan bank lebih superior dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya dalam menghadapi informasi yang asimetris dan mahal biaya dalam melakukan fungsi intermediasi. Secara alami bank mampu melakukan kesepakatan dengan berbagai tipe peminjam. (Alamsyah, dkk, 2005)

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana. Aktivitas yang dilakukan oleh bank banyak yang berkaitan dengan kegiatan perkreditan baik secara langsung maupun tidak langsung (Shandy, 2013).

Salah satu alasan banyaknya aktivitas bank dalam penyaluran kredit adalah fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dan sebagai sumber dana utama bank yang berasal dari

masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagaimana umumnya yang terjadi pada Negara berkembang, Indonesia juga masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan sebagai sumber pembiayaan dunia bisnis di Indonesia. Kelancaran kegiatan penyaluran kredit memberikan dampak yang positif bagi pembangunan perekonomian masyarakat (Zulcha, 2009).

Pentingnya kredit bagi perekonomian nasional juga disadari betul oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) lahir sebagai respon atas keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya bidang Reformasi Sektor Keuangan, yang bertujuan untuk menggerakkan sektor riil melalui kredit modal kerja atau kredit investasi bagi usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable*. Disisi lain Bank Indonesia berniat mengubah lagi aturan Giro Wajib Minimum (GWM). Perubahan ini bertujuan untuk mendorong penyaluran kredit perbankan. Dalam aturan yang berlaku itu, besarnya GWM untuk tiap bank sesuai dengan rasio penyaluran kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (*Loan to Deposit Ratio*) bank tersebut. (Inpres, 2007)

Tujuan pemberian kredit bagi bank adalah untuk mendapatkan keuntungan yang optimal serta menjaga keamanan atas dana yang dipercayakan nasabah penyimpan dana di bank. Kredit yang aman dan produktif memberikan dampak positif bagi bank, yaitu pertama kepercayaan masyarakat terhadap bank meningkat, dan yang kedua adalah *profitability* dan bersinambungan usaha akan berlanjut (Ericson, 2007).

Salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit dan sumber utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pemberian kredit merupakan aktivitas bank

yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, tetapi risiko yang terbesar dalam bank juga bersumber dari pemberian kredit. Oleh karena itu pemberian kredit harus dikawal dengan manajemen risiko yang ketat. Sebagaimana umumnya negara berkembang, sumber pembiayaan dunia usaha di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. (InfoBankNews.com, 2007)

Penyaluran kredit memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. Melalui fungsi ini bank berperan sebagai *Agent of Development*. Selain itu penyaluran kredit juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. (Susilo dkk, 2006)

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penyaluran kredit mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dana berlebih (*surplus fund*) yang disalurkan secara efisien bagi unit yang mengalami defisit akan meningkatkan kegiatan produksi. Selanjutnya kegiatan tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada level mikro adanya kendala dalam penyaluran kredit dapat berdampak pada kehancuran usaha - usaha kecil. Dalam makro transmisi kebijakan sangat berperan penting dalam mengatur dana berlebih tersebut. (Pratama, 2010)

Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang secara implisit beranggapan bahwa semua dana yang dimobilisasi perbankan dari masyarakat dalam bentuk uang beredar dipergunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit perbankan. Dalam kenyataannya anggapan seperti itu tidak selamanya benar. Selain dana yang tersedia perilaku penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank

terhadap prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri seperti permodalan (CAR), *Return on Asset* (ROA), dan Operasional (BOPO). (Warjiyo, 2004)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Satria dan Subegti (2010) dan Oktaviani (2012) menemukan bahwa *capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit perbankan. Sementara itu hasil yang ditemukan oleh Pratama (2010) CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap kredit perbankan. Sedangkan menurut Galih (2011) menemukan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap kredit perbankan.

Penelitian mengenai *return on assets* (ROA) menurut Meydianawathi (2007) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit perbankan. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Arisandi (2008), Satria dan Subegti (2010), dan Galih (2011). Sementara hasil yang ditemukan oleh Oktaviani (2012) dan Yuwono (2012) menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

Melalui penelitiannya Yulhasnita (2013) bahwa rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit. Berbeda dengan hasil yang ditemukan oleh Yanto (2010) bahwa BOPO berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kredit perbankan. Sedangkan hasil yang ditemukan oleh Satria dan Subegti (2010) menyatakan bahwa BOPO berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit. Dengan demikian tingkat BOPO dapat mengukur kecukupan modal agar dapat menentukan besarnya penyaluran kredit pada suatu bank.

Kecukupan modal yang tinggi dan memadai akan meningkatkan jumlah penyaluran kredit perbankan. Dari tingkat profitabilitas juga harus selalu menjadi perhatian bank. Bahwa bagaimana bank tersebut harus mampu mengoptimalkan aktiva yang dimiliki agar mampu menghasilkan pendapatan. Kaitannya dengan cara mengukur tingkat profitabilitas, dapat menggunakan rasio ROA atau *return on assets*. Tingkat efisiensi kinerja operasional perbankan juga tidak kalah penting. Dimana tingkat operasional sering diukur menggunakan

beban operasional terhadap pendapatan operasional atau biasa disingkat menjadi BOPO. Hal ini terkait dengan kegiatan utama perbankan yang berperan dalam penyaluran kredit ke masyarakat. rasio ini akan dibandingkan antara biaya operasional dan pendapatan operasionalnya. Dimana semakin kecil rasio ini, artinya bank tersebut semakin efisien dalam mengeluarkan biaya guna mendapatkan pendapatan. (Warjiyo, 2006)

Rasio beban operasi terhadap pendapatan operasi dihitung dengan menggunakan perbandingan antara beban operasi dengan pendapatan operasi atau yang di Indonesia sering disebut dengan BOPO. Mengingat kegiatan utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana, maka biaya bunga dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan pendapatan bunga. Dendawijaya (2003) menyatakan bahwa semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. BOPO merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesehatan bank, karena hal ini terkait dengan kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan. Hal ini terkait dengan kegiatan operasi bank itu sendiri, manakala bank tersebut mengalami kerugian terus-menerus hal ini akan berimbas pada modal yang dimiliki bank yang akan terus terkikis.

BOPO rata-rata bank umum dari tahun 2002 – 2016 mengalami kenaikan sebesar 83,67% dan penyaluran kredit juga terus meningkat dengan rata – rata peningkatannya sebesar 1.847.368 milyar. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada, BOPO adalah rasio beban operasi terhadap pendapatan operasi dihitung dengan menggunakan perbandingan antara beban operasi dengan pendapatan operasi. Apabila BOPO meningkat, maka akan mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin sedikit kredit yang dapat disalurkan bank, dan menyebabkan jumlah kredit semakin menurun maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. (Fajar, 2013).

Salah satu alasan banyaknya aktivitas bank dalam penyaluran kredit adalah fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dan sebagai sumber penyaluran dana dalam bentuk kredit. Dengan adanya penyaluran kredit memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penyaluran kredit mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Serta dengan adanya fenomena dimana BOPO yang terus meningkat yang akan menurunkan jumlah penyaluran kredit suatu bank sehingga menyebabkan jumlah kredit turun maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian ini mengambil judul :

“ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT PADA BANK UMUM DI INDONESIA”

1.2 Rumusan Masalah

A. Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi global yang membaik pada 2017 menjadi momentum ekspansi kredit perbankan. Saatnya perbankan nasional memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan lebih baik daripada 2016 oleh sejumlah lembaga internasional itu. Misalnya, dalam laporan World Bank, diproyeksikan pada 2017 ekonomi dunia tumbuh 2,8 persen. Angka itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan proyeksi 2016 yang hanya mampu tumbuh 2,4 persen.

Hal senada diutarakan Dana Moneter Internasional (IMF). Perkiraan IMF, ekonomi global dapat tumbuh 3,4 persen atau lebih baik bila dibandingkan dengan 2016 yang hanya sebesar 3,1 persen. Laporan pendukung lain adalah proyeksi Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD). Menurut OECD, pada 2017 ekonomi akan tumbuh 3,2 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan 2016 yang hanya sebesar 2,9 persen.

Perbankan harus menangkap sinyal positif dari pertumbuhan ekonomi global tersebut dengan memacu ekspansi kredit pada 2017. Ada beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi perbankan untuk menggenjot ekspansi kredit. Pertama, permasalahan likuiditas. Kebijakan bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed), yang berniat menaikkan suku bunga acuan hingga tiga kali pada 2017 menjadi masalah perbankan. Kebijakan The Fed akan memacu capital outflow yang bisa mengetatkan likuiditas pasar keuangan, termasuk di Indonesia. Jika likuiditas ketat, penyaluran kredit perbankan semakin terbatas. Ketatnya likuiditas terlihat dari loan to deposit ratio (LDR) perbankan sepanjang 2016 yang sudah berada di ambang batas atas.

Kedua, kontroversi kebijakan presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Trump akan membentengi ekonomi domestik dari serbuan produk asing lewat penerapan bea masuk tinggi terhadap produk sejumlah negara seperti Tiongkok. Dengan begitu, produk Tiongkok berpeluang membanjiri pasar domestik dan menggerus produk lokal. Akibatnya, turunnya permintaan ekspor akan memukul perusahaan nasional, yang menyebabkan turunnya pendapatan debitor sehingga menunda pengajuan penambahan kredit atau pengajuan kredit baru.

Hal itu dikuatkan dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pertumbuhan kredit perbankan nasional per November 2016 mencapai Rp 4.285 triliun atau mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 8,46 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan kredit tersebut sepanjang 2016 diproyeksikan hanya 7–9 persen, terus menurun dari proyeksi awal yang sebesar 11–13 persen.

Ketiga, kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang masih membayangi 2017. Bank harus menyediakan pencadangan dalam jumlah besar, yang ujungnya menggerus

laba. Kredit macet masih menjadi momok menakutkan, lebih-lebih kalau kurs rupiah terhadap dolar AS tertekan. Rasio kredit bermasalah per November 2016 sebesar 3,18 persen untuk gross dan 1,38 persen untuk net.

Keempat, maraknya financial technology (fintech) dan start-up menjadi ancaman perbankan. Fintech dan start-up melalui inovasi teknologi menawarkan jasa-jasa dan produk serupa bank. Dengan demikian, mereka mengambil ceruk pasar perbankan.

Selain tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang dan prospek perbankan dalam melakukan ekspansi kredit 2017. Pertama, optimisme perbankan dalam menyikapi pertumbuhan bisnis pada 2017. Optimisme bisnis perbankan terlihat dari data rencana bisnis bank (RBB) yang disampaikan kepada OJK. Menurut OJK, pertumbuhan kredit 2017 meningkat sebesar 9–11 persen. Angka itu lebih tinggi daripada proyeksi 2016 yang hanya sebesar 7–9 persen. Bahkan, Bank Indonesia (BI) lebih konfiden menyikapi pertumbuhan kredit perbankan dengan memproyeksikan laju kredit 2017 dengan tingkat pertumbuhan lebih tinggi, yaitu 10–12 persen.

Kedua, peran aktif pemerintah menggerakkan ekonomi nasional. Pemerintah telah menggelontorkan 14 paket kebijakan ekonomi bisnis dan program masterpiece amnesti pajak serta APBN 2017 yang responsif. Hal itu menjadi modal kuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi yang kondusif tersebut menjadi modal pelaku usaha untuk dapat menggerakkan sektor-sektor prioritas (termasuk di dalamnya sektor riil) yang tentu membutuhkan peran intermediasi perbankan. Peningkatan permintaan kredit produktif dari segmen wholesale, middle, dan usaha kecil menengah (UKM), baik untuk kredit modal kerja (KMK) maupun kredit investasi (KI), disertai perbaikan serapan kredit konsumtif di sektor ritel.

Ketiga, tingkat kesehatan perbankan 2016 secara umum kian membaik. Menurut laporan OJK (3/1/2017), seluruh bank nasional berada dalam kondisi sehat dan cukup sehat

pada 2016. Sebelumnya, pada 2015, ada satu bank yang dinyatakan kurang sehat. Kondisi kesehatan bank selama 2016 tersebut menjadi energi positif bagi perbankan untuk dapat lebih meningkatkan kinerja ekspansi kredit pada 2017.

Keempat, pemberlakuan suku bunga kredit single-digit. OJK dan BI terus mendorong industri perbankan untuk menerapkan suku bunga kredit single-digit hingga akhir Desember 2017. Hal tersebut merupakan stimulus pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usaha melalui kredit bunga yang bisa terjangkau dan lunak.

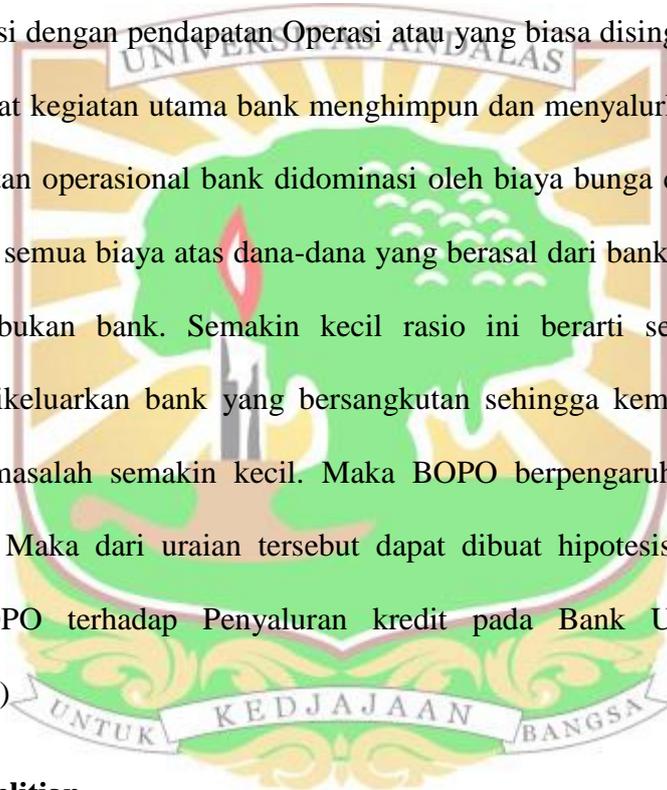
Kelima, pemulihan harga komoditas. Harga komoditas diprediksi lebih menguat pada 2017 seiring dengan pertumbuhan ekonomi global dan masalah surplus pasokan yang kian berkurang. Komoditas utama yang mengalami tren bullish 2017 ialah minyak, tembaga, seng, dan gandum. Kondisi tersebut menyebabkan gairah ekonomi nasional yang mendorong kebutuhan pemenuhan modal perusahaan dari ekspansi kredit.

B. Bagaimana Pengaruh CAR, ROA, BOPO terhadap Penyaluran Kredit di Indonesia

Menurut Susilo (2000), bahwa kecukupan modal merupakan faktor yang sangat penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Bank Indonesia menetapkan CAR yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasiruddin (2005), Kristijadi dan Laksana (2006) dan Hermawan (2009) CAR berpengaruh signifikan positif terhadap penyaluran kredit. Maka dari uraian tersebut dapat dibuat hipotesis ada pengaruh yang positif antara CAR terhadap Penyaluran kredit pada Bank Umum di Indonesia.

Bank dengan total asset relatif besar akan mempunyai kinerja yang lebih baik karena mempunyai total revenue yang relatif besar sebagai akibat penjualan produk yang meningkat. Dengan meningkatnya *total revenue* tersebut maka akan meningkatkan laba perusahaan sehingga kinerja keuangan akan lebih baik. ROA berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran kredit. Maka dari uraian tersebut dapat dibuat hipotesis ada pengaruh yang positif antara ROA terhadap Penyaluran kredit pada Bank Umum di Indonesia. (Wisnu Mawardi,2005)

Operating Expense to Operating Income dihitung dengan menggunakan perbandingan antara Beban Operasi dengan pendapatan Operasi atau yang biasa disingkat dengan BOPO di Indonesia. Mengingat kegiatan utama bank menghimpun dan menyalurkan dana, maka biaya bunga dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan pendapatan bunga. Biaya bunga adalah semua biaya atas dana-dana yang berasal dari bank Indonesia, bank lain, dan pihak ketiga bukan bank. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Maka BOPO berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit. Maka dari uraian tersebut dapat dibuat hipotesis ada pengaruh yang negatif antara BOPO terhadap Penyaluran kredit pada Bank Umum di Indonesia. (Dendawijaya, 2004)



1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Menganalisis perkembangan penyaluran kredit Bank umum di Indonesia.
2. Menganalisis Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Retun on Asset* (ROA) terhadap penyaluran kredit Bank Umum di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan penulis dan pembaca lainnya tentang pengaruh yang ditimbulkan dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Retun on Asset* (ROA) terhadap penyaluran kredit Bank Umum di Indonesia.
2. Bagi penulis, untuk menerapkan teori – teori yang telah dipelajari selama kuliah khususnya mengenai mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.
3. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan dan bahan pertimbangan dalam menentukan langkah – langkah dan kebijakan – kebijakan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan moneter, terutama terhadap Penyaluran Kredit di Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian akan dilakukan secara terarah dan lebih fokus atas masalah yang diteliti, maka perlu adanya ruang lingkup penelitian, yaitu waktu penelitian (times series) yang digunakan dimulai dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2016 di Payakumbuh. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel terikat (*dependent variabel*) dan empat variabel bebas (*independent variabel*). Adapun variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Variabel Bebas (*Independent Variabel*) *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Retun on Asset* (ROA).
2. Variabel Terikat (*dependent variabel*) yaitu Penyaluran Kredit.

Data yang digunakan adalah data dari tahun 2002 sampai tahun 2016.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Retun on Asset* (ROA) terhadap Penyaluran kredit pada Bank umum di. Bab ini juga menjelaskan, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini serta ruang lingkupnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang kerangka teori yang digunakan dan temuan empiris serta hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian ada penjabaran penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Dan diakhir bab ini terdapat hipotesis sementara.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis data yang digunakan serta penjelasan dari permasalahan yang telah dirangkum dalam rumusan masalah pada bab 1, serta penjelasan analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan kondisi umum daerah dan kemudian menjelaskan perkembangan Dana pihak ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Retun on Asset* (ROA) dan penyaluran kredit Bank Umum di Payakumbuh.

BAB V : TEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Dalam bab ini memuat hasil dan pembahasan dari analisa data yang telah di teliti serta merumuskan kebijakan apa yang perlu dan bisa di ambil dalam

penelitian ini.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan singkat dari penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi saran untuk berbagai pihak.



